

Siti Maghfiroh<sup>1</sup>, Naufal Luthfi Alifa<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1,2</sup>

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author: [maghfirohsiti494@gmail.com](mailto:maghfirohsiti494@gmail.com)

\*Correspondence: [maghfirohsiti494@gmail.com](mailto:maghfirohsiti494@gmail.com)\* | Submission Received : 19-12-2025; Revised : 30-02-2026; Accepted : 30-05-2026; Published : 30-06-2026

### **Abstract**

*The purpose of this study is to compare the policy direction and development of Islamic economic institutions (IEC) between the United Arab Emirates (UAE), a predominantly Muslim-majority country that is an international Islamic financial center, and Serbia, a Muslim-minority country in Southeastern Europe that offers new opportunities for IEC development. This study uses a descriptive qualitative approach through library research and comparative policy analysis. This study shows that the UAE can implement targeted and centralized regulations, reinforced by government support through institutions such as the Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC). This policy has successfully encouraged an increase in Islamic financial assets and strengthened its market position in several sectors. On the other hand, Serbia still faces structural obstacles, including low public understanding, the absence of adequate Sharia regulations, and limited retail financial products, despite the existence of Islamic banking institutions focused on corporate financing. The results of this comparison offer important lessons for Indonesia regarding the need to strengthen centralized regulations while increasing public literacy in a multicultural context.*

**Keywords:** *Islamic Economic Institutions, United Arab Emirates, Serbia.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan arah kebijakan serta perkembangan kelembagaan ekonomi Islam (KEI) antara Uni Emirat Arab (UEA) yang mayoritas penduduknya Muslim dan menjadi pusat keuangan syariah internasional dengan Serbia negara minoritas Muslim di kawasan Eropa Tenggara yang memiliki peluang baru dalam pengembangan KEI. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melalui studi literatur (*library research*) dan analisis kebijakan secara komparatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa UEA dapat mengimplementasikan regulasi yang terarah dan bersifat sentralistik, yang diperkuat oleh dukungan pemerintah melalui lembaga seperti *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC). Kebijakan tersebut berhasil mendorong peningkatan aset keuangan syariah serta memperkuat posisi pasar di sejumlah sektor. Di sisi lain negara Serbia masih mengalami kendala struktural, antara lain rendahnya pemahaman publik, tidak adanya aturan syariah yang memadai, dan masih terbatasnya produk keuangan ritel, walaupun sudah terdapat lembaga perbankan syariah dengan fokus pembiayaan korporasi. Hasil perbandingan ini menawarkan pembelajaran penting bagi Indonesia mengenai perlunya penguatan regulasi terpusat sekaligus peningkatan literasi masyarakat dalam konteks multikultural.

**Kata kunci:** *Institusi Ekonomi Islam, Uni Emirat Arab, Serbia.*

## INTRODUCTION

Dalam dua puluh tahun terakhir perkembangan ekonomi Islam menunjukkan dinamika yang semakin beragam dan tidak lagi terbatas pada wilayah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sistem ekonomi ini kini dipandang sebagai alternatif yang memiliki nilai strategis di tingkat global karena mampu menawarkan model yang lebih etis dan berkelanjutan (Tiran, 2023). Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan instrumen keuangan Islam, pertumbuhan lembaga keuangan berbasis Islam, dan penerapan luas prinsip-prinsip moral dan keberlanjutan yang berasal dari ajaran Islam di banyak negara (Liu & Lai, 2021). Keberadaan ekonomi Islam dianggap mampu mengatasi berbagai masalah dalam sistem keuangan konvensional, seperti ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang, volatilitas pasar yang tidak stabil, dan kesenjangan distribusi kesejahteraan. Nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan mekanisme pembagian keuntungan membuat ekonomi Islam relevan bagi berbagai kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang agama mereka (Hidayat, 2025).

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan salah satu negara yang berhasil membangun ekosistem ekonomi Islam secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Dengan visi besar untuk menjadikan Dubai sebagai “pusat ekonomi Islam dunia,” pemerintah UEA melaksanakan berbagai strategi melalui koordinasi kelembagaan yang solid, pembaruan regulasi, serta penciptaan iklim industri yang mendukung (Mashal, 2022). Pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor-sektor yang menjadi pilar ekonomi Islam, seperti keuangan syariah, industri halal, pariwisata berbasis nilai Islam, teknologi finansial syariah, hingga sektor ekonomi kreatif. Komitmen tersebut tercermin dari pertumbuhan nilai aset keuangan syariah UEA dan meningkatnya minat investor global terhadap pasar syariah negara (Turan, 2023). Keberhasilan ini tidak hanya ditopang kondisi sosial ekonomi, tetapi juga oleh adanya struktur tata kelola yang terpusat, seperti peran *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC), yang berfungsi mengharmonisasikan kebijakan, mendorong inovasi, serta memperkuat hubungan antar-sektor ekonomi.

Berbeda dengan UEA, perkembangan ekonomi Islam di negara minoritas Muslim terutama di kawasan Eropa yang menunjukkan karakteristik yang lain. Serbia menjadi salah satu studi kasus yang menarik, karena meskipun jumlah penduduk Muslimnya tidak besar, negara ini mulai mengadopsi konsep keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dan membuka peluang bagi investasi asing, khususnya dari Timur Tengah (Yagoub,

2019). Meskipun pertumbuhan masih lambat, Serbia memiliki potensi di sektor keuangan Islam. Namun perkembangan ini juga dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran publik, kurangnya regulasi yang komprehensif, dan peran pemerintah yang minim dalam mempromosikan lembaga ekonomi Islam. Situasi ini menjadikan Serbia sebagai contoh negara non-Muslim yang baru memasuki tahap awal dalam membangun fondasi lembaga ekonomi Islam (Kacar et al., 2017).

Perbandingan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia penting karena kedua negara ini mewakili dua model pembangunan yang sangat berbeda. UEA telah mengembangkan ekonomi Islamnya melalui pendekatan yang didorong oleh negara, yang ditandai dengan dukungan kebijakan yang kuat, peraturan yang seragam, dan perencanaan terpusat. Di sisi lain Serbia lebih mengandalkan pendekatan yang didorong oleh pasar, yang berkembang dari permintaan konsumen dan inisiatif lembaga keuangan tertentu, tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Kedua pendekatan ini menggambarkan bagaimana faktor struktural dan sosial mempengaruhi pembentukan lembaga ekonomi Islam, memberikan acuan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi besar dan konteks sosial yang sangat beragam (Hanif, 2025).

Keterbatasan Jumlah studi akademik yang membandingkan negara-negara dengan karakteristik berbeda yang terbatas merupakan alasan penting lainnya untuk melakukan penelitian ini. Terdapat cukup banyak studi tentang perkembangan ekonomi Islam di negara-negara Muslim, namun penelitian yang secara khusus menyoroti perbandingan antara negara-negara Muslim yang sudah memiliki ekosistem ekonomi Islam yang kuat, seperti Uni Emirat Arab (UEA), dan negara-negara non-Muslim yang baru mulai membangun fondasi institusional seperti Serbia masih jarang (Pesendorfer & Lehner, 2016). Kekurangan literatur perbandingan telah menyebabkan pemahaman yang terbatas tentang keragaman pendekatan institusional dalam pengembangan ekonomi Islam. Faktanya, analisis perbandingan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana struktur budaya, politik, regulasi, dan sosial mempengaruhi efektivitas institusi ekonomi Islam dalam berbagai konteks.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui studi mendalam tentang dinamika lembaga dan kebijakan ekonomi Islam di Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia. Fokus penelitian mencakup empat poin utama, yaitu: pertama, profil geografis, demografis, dan ekonomi UEA dan Serbia. kedua, dinamika lembaga ekonomi Islam di UEA dan Serbia. ketiga, tantangan dan strategi untuk memperkuat lembaga ekonomi

Islam global di UEA dan Serbia. dan terakhir, perbandingan reflektif antara lembaga ekonomi Islam di UEA dan Serbia bagi Indonesia serta kondisi sosioekonomi yang menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur dan kebijakan untuk memahami bagaimana dinamika di dua negara dengan karakteristik yang berbeda ini dapat memberikan pelajaran penting bagi pengembangan ekonomi Islam di negara lain.

Temuan dari perbandingan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia ini memiliki signifikansi strategis bagi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan struktur sosial yang *pluralistik*, Indonesia membutuhkan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan regulasi pemerintah sekaligus memenuhi beragam kebutuhan penduduknya. Pengalaman UEA menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan dukungan negara dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam. Sementara itu, pengalaman Serbia menunjukkan bahwa literasi publik dan kesiapan pasar merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan sejak awal pembangunan. Dengan memahami kedua model tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk memperkuat lembaga ekonomi Islam di Indonesia, baik dari segi regulasi, pendidikan publik, maupun pemanfaatan peluang ekonomi global.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis tentang perkembangan lembaga ekonomi Islam di berbagai negara. Pendekatan komparatif antara UEA dan Serbia tidak hanya memberikan wawasan tentang perbedaan dinamis antar konteks, tetapi juga membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekonomi Islam di Indonesia, khususnya dalam mengatasi tantangan dan peluang di tengah ekonomi global yang semakin kompetitif.

## LITERATURE REVIEW

Lembaga ekonomi Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan, nilai, dan lembaga yang membimbing dan mengawasi aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Cakupan lembaga-lembaga ini meliputi berbagai sektor mulai dari perbankan berbasis Syariah dan teknologi keuangan, pasar modal Islam, industri halal, hingga instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Upaya untuk memperkuat lembaga ekonomi Islam tidak dapat hanya bergantung pada aspek keuangan saja, tetapi membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, literasi publik yang memadai, dan kemitraan antara lembaga

negara dan sektor swasta untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Samud et al., 2025). Oleh karena itu literatur tentang kebijakan ekonomi Islam harus mempertimbangkan aspek hukum, peran otoritas pemerintah, kreativitas pengembangan produk, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai elemen pelengkap.

Beragam penelitian menunjukkan bahwa negara dengan populasi yang mayoritas Masyarakatnya Muslim cenderung memiliki basis kelembagaan ekonomi Islam yang lebih kokoh karena didukung legitimasi sosial dan kebijakan yang relatif stabil. Dalam konteks ini Uni Emirat Arab (UEA) sering dikemukakan sebagai contoh keberhasilan pengembangan ekosistem ekonomi Islam yang komprehensif. UEA menjalankan pembangunan kelembagaan melalui penyusunan regulasi yang modern, penyesuaian standar Syariah, serta pendirian institusi khusus seperti *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC) yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan antar-sektor. Kejelasan regulasi, komitmen pemerintah, serta dorongan terhadap inovasi produk menjadikan UEA salah satu pusat ekonomi Syariah global yang berkembang pesat (Akhyar, et al., 2025).

Sebaliknya, literatur mengenai negara non-Muslim menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Negara Eropa seperti Serbia menghadapi hambatan struktural dalam membangun industri keuangan Syariah. Rendahnya tingkat pemahaman publik mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta belum tersedianya regulasi yang memadai menjadi faktor yang memperlambat pembentukan sektor ini. Selain itu negara-negara di kawasan Balkan masih berada pada tahap pengenalan awal terhadap sistem pembiayaan Syariah, sehingga memerlukan adaptasi hukum dan regulasi yang berlangsung secara bertahap untuk memberikan legitimasi bagi produk-produk keuangan Syariah dalam kerangka hukum nasional. Minimnya dukungan pemerintah, lemahnya infrastruktur kelembagaan, serta cakupan pasar yang masih terbatas menyebabkan perkembangan ekonomi Islam di Serbia bergerak secara perlahan (Grira, 2021).

Literatur yang membandingkan UEA dan Serbia mengungkap dua pendekatan yang sangat berbeda dalam mengembangkan lembaga ekonomi Islam. UEA menerapkan strategi pembangunan dari atas ke bawah *top-down*, dengan pemerintah memainkan peran dominan melalui penyediaan peraturan yang jelas, peningkatan infrastruktur, dan kebijakan proaktif untuk mendorong pertumbuhan industri Syariah. Pendekatan ini telah memungkinkan terbentuknya ekosistem ekonomi Islam yang matang dan berdaya saing global. Serbia, di sisi lain, telah mengejar strategi yang lebih dari *bottom-up*, yang berfokus

pada penguatan literasi publik, pengembangan produk yang terbatas, dan reformasi kebijakan secara bertahap. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pasar atau komposisi demografis, tetapi juga oleh arah kebijakan pemerintah, kepastian regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang perkembangan ekonomi Islam di negara-negara Muslim dan non-Muslim, penelitian yang secara langsung membandingkan model kelembagaan antara negara-negara seperti UEA yang telah menjadi pusat global untuk keuangan Syariah dan Serbia yang masih dalam tahap awal adopsi masih terbatas. Analisis lintas negara sangat penting untuk memahami perbedaan dinamika kelembagaan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi ekonomi Islam di berbagai lingkungan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu penelitian komparatif memainkan peran penting dalam merumuskan strategi untuk memperkuat lembaga ekonomi Islam yang lebih responsif dan berkelanjutan (Kara, 2021).

Tinjauan literatur ini juga relevan bagi Indonesia, mengingat karakteristik uniknya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan struktur sosial yang beragam. Pelajaran dari UEA menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan dukungan kelembagaan yang kuat, sementara pengalaman Serbia menunjukkan bahwa pemahaman publik dan penerimaan pasar merupakan fondasi penting pada tahap awal pembangunan ekonomi Islam. Dengan meneliti kedua konteks negara tersebut Penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan strategi untuk memperkuat lembaga ekonomi Islam di Indonesia yang lebih holistik, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan nasional.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis komparatif untuk menelaah secara mendalam dinamika kelembagaan ekonomi Islam (KEI) di Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan realitas empiris sebagaimana adanya sesuai dengan konteks sosial dan institusional masing-masing negara, sehingga fenomena dapat dipahami secara keseluruhan tanpa perlunya manipulasi variabel. Sementara itu analisis komparatif digunakan untuk menelaah kesamaan serta perbedaan kebijakan, struktur hukum, dan mekanisme kelembagaan di kedua negara yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Sejalan

dengan metode perbandingan kebijakan yang memberi ruang bagi peneliti untuk menilai bagaimana aktor, konteks, dan arah regulasi memengaruhi kinerja suatu sistem kelembagaan (Zetty, 2016).

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi literatur yang dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Sumber data mencakup dokumen kebijakan resmi dari pemerintah kedua negara, laporan dari otoritas keuangan nasional, publikasi lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank*, *IMF*, dan *World Bank*, serta artikel jurnal ilmiah yang secara spesifik mengulas perkembangan KEI di UEA, Serbia, dan kawasan Balkan. Selain itu laporan industri seperti *Global Islamic Economy Report* juga digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai arah perkembangan ekonomi syariah di tingkat global. Pemanfaatan beragam sumber tersebut bertujuan untuk menghasilkan analisis yang akurat, lengkap, dan saling menguatkan.

Tahap analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan. Proses reduksi dimulai dengan memilah informasi relevan dari berbagai sumber, kemudian mengorganisasikannya ke dalam tema tertentu untuk memetakan pola kebijakan di masing-masing negara. Analisis selanjutnya berfokus pada identifikasi faktor pendorong kebijakan (*policy drivers*) di UEA, misalnya dukungan kuat pemerintah, harmonisasi regulasi, serta kesiapan infrastruktur kelembagaan. Sebaliknya, penelitian ini juga menelaah berbagai hambatan kebijakan (*policy constraints*) di Serbia, termasuk keterbatasan legitimasi hukum, kapasitas institusi yang belum optimal serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konsep keuangan syariah (Kurniasih et al., 2021).

Pendekatan komparatif diterapkan dengan meninjau kondisi sosial, kerangka regulasi, kesiapan pasar, dan tingkat dukungan negara dalam memperkuat institusi ekonomi Islam pada masing-masing kasus. Analisis ini memperlihatkan dua jalur perkembangan yang sangat berbeda. UEA berkembang melalui strategi *top-down* yang progresif dan modern, sedangkan Serbia bergerak dengan pola *bottom-up* yang lebih lambat dan sangat bergantung pada peningkatan literasi publik. Perbedaan arah strategi tersebut memperjelas bahwa variasi dinamika kelembagaan ekonomi Islam tidak sekadar dipengaruhi oleh komposisi demografi Muslim, tetapi juga oleh desain kebijakan, stabilitas institusi, serta kesiapan masyarakat dalam menerima layanan keuangan syariah.

Pada tahap akhir, penelitian diarahkan untuk merumuskan implikasi kebijakan yang

relevan bagi konteks Indonesia. Pengalaman UEA menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan KEI bergantung pada konsistensi regulasi, koordinasi antar-lembaga yang efektif, serta modernisasi infrastruktur pendukung. Sebaliknya kondisi Serbia memberikan pembelajaran bahwa dalam masyarakat yang *plural*, penguatan ekonomi Islam harus diawali dengan peningkatan literasi publik, penegasan dasar hukum, serta strategi penetrasi pasar yang bertahap. Melalui integrasi pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis perbandingan penelitian ini berupaya memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pengembangan kelembagaan ekonomi Islam yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.

## RESULT AND DISCUSSION

### Profil Geografis, Demografis, dan Perekonomian Negara UEA dan Serbia

Uni Emirat Arab terletak di Asia barat daya, di sebelah timur Arab Semenanjung, berbatasan dengan utara dan barat laut oleh perairan Teluk Arab dan di sebelah timur oleh Samudera Hindia. Negara ini memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia Qatar di barat laut, sementara ada perbatasan darat dengan Arab Saudi di selatan dan barat dan dengan Kesultanan Oman di tenggara. Uni Emirat Arab terletak di antara garis lintang 22 dan 26,5 derajat ke utara dan Longitudes 51 dan 56,5 derajat timur Greenwich, sebelah utara khatulistiwa, di zona tropis (Christian et al., 2024).

Negara ini memiliki luas 83.600 km<sup>2</sup>, dimana 87% bagiannya merupakan *Emirate of Abu Dhabi*. Populasinya saat ini adalah 7,9 juta, federasi UEA memiliki tujuh anggota emirat, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm alQaiwain, Ra's al-Khaimah dan Fujairah. Sekitar 74% dari luas daratannya ditandai sebagai gurun tapi ada berbagai macam lanskap termasuk bukit pasir merah yang menjulang tinggi di daerah Liwa, yang meluas ke Al Ain, sebuah oasis alam yang dihiasi pohon palem pegunungan yang kasar dan dataran pantai datar. Pegunungan mewakili 2,6% dari total luas.

Dalam perairan teritorial Uni Emirat Arab lebih dari 200 pulau dengan ukuran berbeda dan asal-usul geologi dan tingkat kepentingan yang berbeda. Sebagian besar wilayah UEA adalah gurun, dengan beberapa oase tersebar di sepanjang pesisir dan di pedalaman. Meskipun demikian UEA telah berhasil mengembangkan infrastruktur yang maju terutama di kota-kota seperti Abu Dhabi dan Dubai, yang menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan pariwisata yang penting di wilayah tersebut. Situasi geografis UEA juga mempengaruhi iklimnya, yang umumnya panas dan kering sepanjang tahun, terutama di musim panas (Putra,

2025). Namun keberadaan Teluk Persia memberikan sedikit kelembaban tambahan di beberapa wilayah pesisir. Secara keseluruhan situasi geografis UEA menimbulkan tantangan dan peluang yang unik bagi negara tersebut, baik dalam hal ekonomi, keamanan, maupun lingkungan.

Menurut data demografi populasi Uni Emirat Arab (UEA) terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah pria dan wanita. Dalam total populasi sekitar 69.01% merupakan pria sementara wanita hanya sekitar 30.99%. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan ini salah satunya adalah komposisi pekerja migran di UEA dimana mayoritas pekerja migran yang datang ke negara ini adalah pria yang bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi, perdagangan, dan layanan. Hal ini dapat mengakibatkan proporsi pria yang lebih tinggi dalam populasi keseluruhan. Selain itu ada faktor budaya dan sosial yang berperan dalam perbedaan proporsi gender ini (Khotamin et al., 2024). Contohnya preferensi keluarga terhadap anak laki-laki dalam beberapa budaya di wilayah tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam populasi.

Berbeda dengan Negara Serbia yang terletak di Benua Tenggara (Balkan), pada koordinat sekitar 44° LU, 21° LU. Luas daratan Serbia sekitar 77.474 km<sup>2</sup>. Serbia adalah negara yang terkurung daratan, artinya tidak memiliki garis pantai. Topografi Serbia yang beragam mulai dari dataran subur hingga pegunungan, menyediakan lanskap geografis yang beragam dan potensi lahan pertanian, hutan, dan sumber daya alam. Bentuk lahannya sangat beragam. Di utara terdapat dataran subur yang cocok untuk pertanian, sedangkan di timur dan tenggara terdapat pegunungan, perbukitan, dan lereng. Titik tertinggi di Serbia mencapai sekitar 2.169 meter di puncak Midzor.

Menurut data tahun 2018 penggunaan lahan di Serbia didominasi oleh pertanian dengan sekitar 57,9% lahan digunakan untuk pertanian dan sisanya berupa hutan (sekitar 31,6%). Iklim di Serbia utara adalah kontinental, dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas dan lembap dengan curah hujan yang cukup merata. Di bagian lain Serbia iklimnya bisa berupa campuran iklim kontinental dan Mediterania, dengan musim dingin cenderung dingin dan kadang-kadang bersalju, dan musim panas sangat panas dan kering.

Jumlah perkiraan populasi sekitar 6.693.375 jiwa pada 2023. Komposisi etnis Serbia didominasi oleh Serbia yang relatif homogen, mayoritas beretnis Serbia dan beragama Kristen Ortodoks yang mewakili sekitar 83,3%, diikuti oleh minoritas seperti Hungaria (sekitar

3,5%), Romani (sekitar 2,1%), Bosnia (sekitar 2,0%), dan kelompok-kelompok lain yang tidak teridentifikasi. Distribusi populasi di Serbia relatif merata di seluruh negeri, tetapi daerah perkotaan cenderung lebih padat daripada daerah pedesaan, tidak seperti UEA yang sangat dipengaruhi arus migrasi, Serbia memiliki dinamika demografis yang lebih stabil. Kehadiran minoritas Muslim terutama di wilayah Sandžak memang membuka peluang bagi keuangan Islam, tetapi skalanya masih kecil dan tidak menjadi pendorong utama pembentukan pasar domestik. Situasi ini sejalan dengan penjelasan pada pendahuluan bahwa negara non-Muslim seperti Serbia cenderung mengalami perkembangan ekonomi Islam yang lebih bertahap dan terbatas karena tidak memiliki basis pasar mayoritas yang secara natural mendorong permintaan terhadap layanan syariah.

Dalam dua dekade terakhir UEA berhasil mengurangi ketergantungan pada minyak melalui strategi diversifikasi yang masif meskipun masih terkenal sebagai produsen migas, kontribusi sektor tersebut terhadap PDB terus menurun. Pada 2023 pertumbuhan ekonomi UEA mencapai 3,6%, ditopang lonjakan sektor non-migas sebesar 6,2%, sedangkan sektor migas turun 3,1%. Sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan paling mencolok antara lain yaitu ada jasa keuangan (14,3% YoY), transportasi dan logistik, konstruksi dan real estate, perdagangan dan ritel, serta pariwisata. Pariwisata memberi kontribusi sekitar 11,7% dari PDB atau sekitar AED 220 miliar dan menciptakan lebih dari 800 ribu pekerjaan pada 2023. Transformasi ini menjadikan UEA sebagai pusat aktivitas global termasuk dalam bidang keuangan syariah yang menjadi bagian dari visi menjadikan Dubai sebagai hub ekonomi Islam internasional (Khaeruddin & Hidayat, 2020). Struktur ekonomi yang terbuka, modern, dan didukung infrastruktur mutakhir menjadi pondasi kuat bagi munculnya ekosistem kelembagaan ekonomi Islam yang mapan.

Sementara itu Serbia memiliki struktur ekonomi yang jauh lebih tradisional. PDB negara ini sebagian besar didukung oleh sektor jasa (52–58%), diikuti oleh industri (24–26%), dan pertanian (3,8–6,5%). Pertumbuhan PDB pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 2,5%, didukung oleh peningkatan investasi modal tetap (3,5%) dan pertumbuhan signifikan di sektor konstruksi (8,9%). Meskipun sektor pertanian tumbuh sekitar 9%, kontribusinya terhadap PDB terus menurun karena pergeseran ekonomi menuju industri dan jasa (Fadilah, 2025). Sektor agroindustri, pertanian, dan pengolahan makanan terus memainkan peran strategis dalam ekspor, misalnya, gandum, jagung, buah-buahan, dan produk susu. Namun industri jasa keuangan belum berkembang pesat sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang

relatif lambat dalam keuangan Islam di Serbia karena orientasi ekonominya terhadap pembiayaan tradisional dan sektor pertanian (Brankov & Matkovski, 2022).

Perbedaan mendasar antara UEA dan Serbia dalam hal geografi, demografi, dan orientasi pembangunan ekonomi menciptakan peluang yang sangat berbeda untuk pengembangan ekonomi Islam. UEA dengan masyarakat multikulturalnya, urbanisasi yang tinggi, dan dukungan pemerintah yang kuat untuk modernisasi sektor keuangan, telah mampu membangun ekosistem keuangan Islam yang komprehensif. Instrumen seperti sukuk, fintech Islam, takaful, wakaf produktif, dan pasar modal Islam telah berkembang pesat, didukung oleh kebijakan negara, stabilitas ekonomi, dan peran strategis Dubai dan Abu Dhabi sebagai pusat keuangan global (Alshater et al., 2022).

Sebaliknya Serbia dengan populasi yang sebagian besar non-Muslim dan ekonomi yang masih didukung oleh pertanian, agroindustri, dan industri makanan, memiliki kebutuhan dan konteks yang berbeda. Kesadaran publik yang rendah, infrastruktur regulasi yang tidak memadai, dan ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan konvensional membatasi ruang lingkup keuangan Islam. Dalam kondisi ini penerapan ekonomi Islam lebih tepat diarahkan pada model pembiayaan berbasis aset, seperti *murābahah*, *salam*, *istisnā'*, *ijarah*, atau skema investasi pertanian. Model ini lebih sesuai dengan karakter sektor riil Serbia khususnya dalam mendukung pembiayaan pertanian, pengolahan makanan, dan proyek pembangunan regional yang membutuhkan skema pembiayaan berbasis aset riil yang stabil.

Perbedaan orientasi ini sejalan dengan pembahasan pada pendahuluan, bahwa negara Muslim cenderung memiliki kesiapan institusional yang lebih kuat, sementara negara non-Muslim membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun legitimasi hukum, literasi masyarakat, serta ekosistem kelembagaan yang mendukung ekonomi Islam.

### **Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara UEA dan Serbia**

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam menunjukkan dinamika yang tidak seragam antara negara berpenduduk mayoritas Muslim dan negara yang bukan Muslim. Dua kasus yang menarik untuk dicermati adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang telah berhasil menempatkan diri sebagai pusat internasional keuangan syariah, serta Serbia negara non-Muslim di kawasan Eropa Tenggara yang mulai membuka ruang bagi praktik ekonomi halal dan berbasis inklusivitas (Rammal et al., 2025). Keduanya memberikan gambaran bagaimana faktor budaya, politik, demografi, dan arah kebijakan ekonomi suatu negara dapat membentuk pola kelembagaan ekonomi Islam yang tumbuh di masing-masing wilayah. Bagi Indonesia

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar studi perbandingan ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

UEA dikenal sebagai salah satu negara yang paling cepat dan progresif dalam mendorong pengembangan ekonomi Islam. Transformasi kelembagaan syariah di negara tersebut tidak hanya berlangsung secara internal, tetapi juga dijadikan strategi nasional untuk menjadikan UEA sebagai pusat global industri halal dan keuangan syariah. Kemajuan tersebut ditopang oleh dukungan kuat dari pemerintah, yang terlihat dari hadirnya regulasi yang jelas, standar syariah yang terpadu, serta lembaga pengawas syariah tingkat nasional. UEA memiliki *Higher Sharia Authority* (HSA) di bawah naungan Bank Sentral yang bertanggung jawab memastikan keseragaman standar syariah di seluruh bank, perusahaan takaful, serta lembaga keuangan lainnya (Sallom & Syu'aib, 2022). Dengan pola tata kelola yang terpusat ini industri keuangan syariah UEA berkembang lebih stabil, kompetitif, dan diakui secara global.

Selain dukungan regulasi, dinamika ekonomi Islam di UEA juga tampak dari kehadiran berbagai institusi syariah yang beragam. UEA menjadi rumah bagi bank-bank syariah besar seperti *Dubai Islamic Bank* dan *Abu Dhabi Islamic Bank*, perusahaan takaful, pasar modal syariah, hingga platform fintech berbasis syariah. Penerbitan sukuk dari UEA juga termasuk yang paling aktif di pasar internasional. Tidak hanya itu prinsip-prinsip syariah diperluas ke sektor riil seperti pariwisata halal, industri pangan halal, ekonomi kreatif Islami, dan pengembangan wakaf produktif (Sukmana et al., 2025). Dengan memanfaatkan keunggulan geopolitik, stabilitas ekonomi, serta kemajuan teknologi, UEA berhasil membangun ekosistem syariah yang modern, terintegrasi, dan mampu bersaing secara internasional. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya relevan bagi negara Muslim, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam percaturan ekonomi global.

Berbeda dari UEA, Serbia merupakan negara non-Muslim yang tidak menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian dari agenda negara. Namun demikian geliat ekonomi Islam tetap muncul berkat keberadaan komunitas. Muslim lokal memiliki hubungan dengan negara-negara Muslim dan kebutuhan untuk berintegrasi dengan pasar global. Serbia belum memiliki bank syariah yang beroperasi secara penuh tetapi sistem ekonominya mulai mengakomodasi transaksi keuangan yang bersifat etis dan inklusif serta sejalan dengan prinsip syariah seperti *ethical financing*, *microfinance*, dan dukungan pembiayaan UMKM berbasis komunitas di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim seperti Sandžak (Holle et al., 2025). muncul

koperasi dan organisasi sosial-ekonomi yang menerapkan praktik mirip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga, dukungan usaha mikro, hingga pengelolaan zakat di tingkat lokal.

Dinamika lain terlihat dari hubungan Serbia dengan negara-negara Muslim seperti Turki, UEA, dan Arab Saudi. Arus investasi asing dari negara-negara tersebut mendorong Serbia untuk menyusun regulasi yang lebih ramah terhadap transaksi keuangan yang berbasis prinsip syariah meskipun tidak secara formal dilabeli “syariah”. Industri halal di Serbia juga tumbuh pesat karena kebutuhan ekspor ke Timur Tengah, menjadikan lembaga sertifikasi halal Serbia cukup aktif dan dikenal di wilayah Eropa (Fuady & Faridah, 2025). Walaupun belum memiliki struktur kelembagaan syariah sekuat UEA perkembangan ekonomi Islam di Serbia berjalan secara inklusif, bertahap, dan didorong oleh kebutuhan ekonomi, bukan ideologi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tetap dapat berkembang di negara non-Muslim ketika terdapat motivasi ekonomi yang memadai.

Perbandingan antara UEA dan Serbia memperlihatkan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam membangun ekonomi Islam. UEA mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui mekanisme *top-down* yakni dimotori oleh negara, regulasi yang jelas, dan visi besar untuk membentuk pusat ekonomi syariah kelas dunia. Model kelembagaannya formal, terstruktur, dan sepenuhnya berada di bawah payung hukum syariah. Sebaliknya di Serbia perkembangan ekonomi Islam tumbuh melalui pendekatan *bottom-up* yaitu muncul dari kebutuhan masyarakat Muslim lokal serta dorongan kerja sama internasional. Pola kelembagaannya lebih sederhana, cakupannya terbatas, dan tidak selalu menggunakan label syariah, tetapi tetap mencerminkan nilai-nilai etis yang sejalan dengan prinsip Islam. UEA menunjukkan integrasi menyeluruh antara ekonomi syariah dan kebijakan nasional, sementara Serbia menghadirkan model adaptasi yang fleksibel di mana nilai-nilai syariah dapat diterapkan tanpa harus mengubah kerangka negara secara resmi.

Pengalaman UEA dan Serbia memberikan sejumlah pembelajaran yang relevan bagi Indonesia. Dari UEA Indonesia dapat mencontoh pentingnya standarisasi nasional, regulasi syariah yang kuat, dan integrasi sektor-sektor strategis mulai dari lembaga keuangan hingga industri halal kreatif. UEA membuktikan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi identitas nasional sekaligus sumber daya strategis dalam menghadapi persaingan global. Penguatan kelembagaan, kejelasan regulasi, serta dukungan infrastruktur digital menjadi aspek yang dapat diadaptasi Indonesia. Sementara dari Serbia, Indonesia bisa belajar bahwa penguatan ekonomi Islam juga dapat berkembang melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis

kebutuhan masyarakat. Penguatan koperasi syariah, dukungan UMKM halal, pembiayaan mikro, hingga sertifikasi halal dapat berjalan efektif tanpa harus menuntut penggunaan label syariah secara formal. Pendekatan ini cocok diterapkan di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan resmi. Pada akhirnya, perbandingan kedua negara tersebut menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak harus bersifat eksklusif. Justru ia dapat tumbuh dalam lingkungan yang plural dan modern. Dengan memadukan pendekatan struktural seperti UEA dan pendekatan komunitas seperti Serbia, Indonesia berpeluang memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Negara UEA dan Serbia**

Perkembangan lembaga ekonomi Islam (IEI) di berbagai negara menghadapi tantangan dan strategi yang sangat berbeda terutama ketika membandingkan negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab (UEA) dengan negara-negara non-Muslim seperti Serbia. Perbedaan dalam konteks sosial, politik, dan demografis, serta kapasitas regulasi, menyebabkan dinamika lembaga IEI di kedua negara berkembang dalam pola yang sangat kontras. Analisis ini penting karena menunjukkan bagaimana regulasi, kesiapan pasar, dan peran negara menjadi faktor penentu dalam kesuksesan pengembangan ekonomi Islam di tingkat global (Khotamin et al., 2024).

Di UEA, pengembangan IEI menghadapi tantangan yang relatif lebih terstruktur meskipun negara ini memiliki komitmen kuat untuk menjadi pusat ekonomi Islam global. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk menyelaraskan fatwa Syariah antar emirat, karena setiap wilayah memiliki otoritas Syariah sendiri, sehingga memerlukan mekanisme nasional untuk menjaga standar yang seragam. Selain itu inovasi teknologi seperti fintech Syariah, blockchain, dan kontrak pintar memerlukan otoritas keuangan untuk memperkuat regulasi yang dapat mengakomodasi model bisnis baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kehati-hatian (Tia, 2021). Tantangan integrasi keuangan digital Islam di UEA memerlukan kerangka hukum progresif yang tetap konsisten dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Tantangan lain adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, karena pertumbuhan industri yang cepat memerlukan ahli Islam, auditor, dan ahli keuangan dengan kompetensi global.

Strategi Uni Emirat Arab (UEA) untuk memperkuat kerangka institusional ekonomi Islam dibangun melalui model proaktif yang berpusat pada negara. Pembentukan Dubai

*Islamic Economy Development Centre* (DIEDC) merupakan langkah kunci yang berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk sektor keuangan Islam, industri halal, pariwisata ramah Muslim, dan sertifikasi Syariah. Kerangka regulasi juga diperkuat dengan implementasi *Shariah Governance Framework*, yang memastikan kemandirian dan akuntabilitas Dewan Syariah di tingkat industri. Di bidang digital UEA telah menerapkan Strategi Blockchain Dubai dan Strategi Tanpa Tunai untuk memperluas adopsi transaksi Islam berbasis teknologi (Mahmuda et al., 2025). Langkah-langkah ini telah menciptakan ekosistem yang memfasilitasi inovasi seperti takaful digital, sukuk berbasis blockchain, dan layanan perbankan Islam otomatis yang terintegrasi secara nasional. Strategi komprehensif ini menganggap tantangan sebagai titik masuk untuk membangun ekosistem ekonomi Islam yang lebih matang, berorientasi global, dan kompetitif.

Berbeda secara mencolok dengan UEA yang memiliki modal politik dan institusional yang sangat kuat sedangkan Serbia menghadapi tantangan fundamental dalam mengembangkan institusi ekonomi Islam. Tantangan paling fundamental adalah ketidakhadiran kerangka hukum yang secara khusus mengatur operasional institusi keuangan Islam, sehingga produk-produk Islam harus beroperasi dalam sistem konvensional yang tidak dirancang untuk kontrak seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah (Kacar et al., 2017). Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang tinggi. Tantangan lain adalah rendahnya literasi keuangan Islam, baik di kalangan regulator maupun masyarakat umum, sehingga keuangan Islam hanya berkembang di segmen kecil seperti komunitas Muslim minoritas atau kebutuhan pembiayaan berbasis aset. Industri keuangan Islam di Serbia masih berada pada tahap awal dan menghadapi resistensi struktural dari sistem perbankan konvensional yang sudah mapan.

Selain hambatan regulasi dan sosial, Serbia juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan ahli Syariah. Ketidakhadiran Dewan Syariah Nasional berarti lembaga keuangan harus mendatangkan ahli dari luar negeri atau menggunakan pendekatan hibrida yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Hal ini berdampak pada kredibilitas produk Syariah di mata investor potensial dan masyarakat umum. Tantangan pasar juga signifikan, karena kurangnya permintaan yang signifikan dari komunitas non-Muslim, keuangan Islam belum dianggap sebagai sektor strategis yang memerlukan dukungan negara.

Dalam menghadapi tantangan ini strategi untuk memperkuat lembaga keuangan Islam di Serbia perlu dilakukan melalui pendekatan bertahap dan berbasis pasar. Langkah pertama

yang paling realistis adalah mendorong pemerintah untuk mengadopsi regulasi yang memfasilitasi, yaitu aturan yang tidak sepenuhnya menciptakan sistem Syariah baru tetapi mengakomodasi kontrak Syariah dalam kerangka hukum yang ada, seperti yang dilakukan di Inggris dan Jepang. Ini dapat dimulai dengan pengakuan hukum atas pembiayaan aset dan perjanjian pembagian keuntungan sehingga bank atau lembaga mikrofinansial dapat menyediakan produk yang sesuai syariah tanpa hambatan hukum. Strategi kedua adalah memperkuat literasi publik melalui kerja sama antara lembaga pendidikan Islam, komunitas diaspora, dan industri keuangan (Abdullah et al., 2017). Dengan pemahaman publik yang meningkat, kepercayaan terhadap produk yang sesuai syariah akan tumbuh secara organik.

Strategi jangka panjang Serbia mencakup pembentukan Dewan Syariah Nasional yang independen atau Dewan Penasihat Syariah untuk memberikan panduan dan kepastian syariah kepada lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kredibilitas industri tersebut. Selain itu Serbia dapat mengadopsi inovasi fintech syariah berbasis digital yang lebih murah dan lebih cepat dalam penetrasinya dibandingkan dengan membangun bank syariah besar. Pendekatan ini relevan karena digitalisasi memiliki hambatan masuk yang lebih rendah dan dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur institusional.

Ketika dibandingkan secara reflektif tantangan dan strategi untuk memperkuat institusi ekonomi Islam di UAE dan Serbia memberikan pelajaran penting bagi pengembangan ekonomi Islam global. UAE menunjukkan bahwa dukungan negara, harmonisasi regulasi, dan digitalisasi dapat menciptakan ekosistem yang dinamis dan sangat kompetitif. Sementara Serbia menggambarkan bahwa bahkan dalam lingkungan non-Muslim dengan regulasi terbatas, ekonomi Islam tetap dapat berkembang melalui *model niche*, inovasi digital, dan pendekatan pasar inklusif. Keduanya menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi, tata kelola yang kuat, pengembangan sumber daya manusia, dan integrasi teknologi sebagai landasan untuk memperkuat institusi ekonomi Islam di masa depan.

### **Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara UEA dan Serbia bagi Indonesia**

Perbandingan antara dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia memberikan dasar refleksi yang penting bagi Indonesia dalam memperkuat arah pengembangan ekonomi syariah nasional. Kedua negara tersebut mencerminkan dua konteks yang berbeda dengan UEA sebagai negara Muslim dengan kapasitas ekonomi kuat dan komitmen negara terhadap ekonomi Islam, serta Serbia sebagai negara non-Muslim yang

mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam secara bertahap melalui kebutuhan pasar, kerja sama lintas negara, serta penerjemahan nilai-nilai etis ke dalam praktik ekonomi. Walaupun keduanya berada pada spektrum berbeda, pola pembelajarannya relevan dan dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam lanskap ekonomi syariah global.

Dalam kasus UEA, kemajuan ekonomi Islam erat kaitannya dengan visi pemerintah yang tegas, kebijakan yang konsisten, dan pembangunan kelembagaan yang dirancang secara terarah mulai dari regulasi hingga operasional teknis. UEA sejak awal menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian inti dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap. Hal tersebut menghasilkan struktur kelembagaan yang komprehensif meliputi regulator, otoritas fatwa tingkat nasional, industri halal, lembaga riset, hingga badan sertifikasi. Salah satu pelajaran utama yang relevan bagi Indonesia adalah pentingnya tata kelola syariah yang terpusat (Alam et al, 2022). Keberadaan *Higher Shariah Authority* di UEA yang menjadi rujukan tunggal bagi seluruh lembaga keuangan menciptakan standar yang seragam dan mengurangi perbedaan interpretasi antar-lembaga.

Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pengalaman UEA untuk memperkuat tata kelola syariah nasional yang saat ini masih *terfragmentasi*. Meskipun Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), implementasi teknis di lapangan masih mengalami variasi karena perbedaan interpretasi di tingkat lembaga. Pengalaman UEA menunjukkan bahwa keselarasan regulasi, integrasi kebijakan, serta posisi pemerintah sebagai penggerak utama menjadi kunci bagi kejelasan arah pembangunan ekonomi syariah.

Tidak hanya regulasi UEA juga unggul dalam inovasi. Transformasi digital seperti pengembangan *Islamic fintech*, sukuk berbasis teknologi, dan sistem pembayaran syariah terpadu memperkuat daya saing globalnya. Indonesia yang sedang mendorong digitalisasi ekonomi dapat mencontoh strategi UEA guna membangun infrastruktur syariah digital yang lebih kuat dan meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi pelaku UMKM. Selain itu, UEA juga aktif memperluas jejaring global melalui kolaborasi internasional di bidang sertifikasi halal, logistik halal, serta perdagangan berbasis standar syariah.

Berbanding terbalik dengan UEA, Serbia memperlihatkan perkembangan ekonomi Islam yang lebih lambat namun adaptif. Sebagai negara non-Muslim, Serbia tidak memiliki agenda nasional khusus untuk mengembangkan ekonomi syariah. Meski demikian, ekonomi Islam tetap tumbuh melalui pendekatan sederhana, seperti penerapan prinsip keuangan etis,

pembiayaan mikro berbasis non-bunga, serta kerja sama dengan negara-negara Muslim. Serbia memberikan pelajaran penting bahwa ekonomi Islam tidak harus berkembang di lingkungan mayoritas Muslim, selama nilai-nilai dasarnya diterjemahkan dalam konsep universal seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Pendekatan Serbia yang *pragmatis* relevan bagi Indonesia dalam memperluas diplomasi ekonomi syariah. Selama ini Indonesia cenderung fokus pada hubungan ekonomi dengan negara mayoritas Muslim, padahal Serbia menunjukkan bahwa negara non-Muslim pun dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan berbagai sektor syariah. Pengalaman Serbia menegaskan bahwa penguatan ekonomi Islam global memerlukan pendekatan yang inklusif, fleksibel, dan menempatkan manfaat ekonomi sebagai prioritas utama. Hal ini dapat mendorong Indonesia untuk memperoleh lebih banyak kerja sama dengan negara non-Muslim di kawasan Eropa, Asia Tengah, dan Amerika Latin, khususnya dalam sektor halal food, pariwisata halal, *green sukuk*, hingga pengembangan wakaf produktif.

Serbia juga memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi Islam dapat dimulai dari level akar rumput. Tanpa institusi keuangan syariah formal, Serbia mengembangkan model pembiayaan komunitas dan UMKM berbasis prinsip syariah. Bagi Indonesia praktik ini sangat relevan untuk memperkuat pembiayaan syariah bagi UMKM sektor yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah formal. Pendekatan berbasis komunitas seperti yang dilakukan Serbia dapat menjadi alternatif strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke wilayah pedesaan dan daerah berkembang (Meskovic et al., 2021).

Secara reflektif beberapa poin penting dapat menjadi rujukan bagi Negara Indonesia. Pertama, Indonesia membutuhkan model kelembagaan yang lebih terkoordinasi sebagaimana diterapkan UEA, khususnya dalam penguatan regulasi dan sistem pengawasan syariah. Kedua, fleksibilitas Serbia dalam membangun kemitraan internasional dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk tidak membatasi kerja sama hanya pada negara Muslim. Ketiga, Indonesia perlu menegaskan bahwa kekuatan ekonomi syariah terletak tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada inovasi digital, efisiensi pasar, serta kemampuan memperluas dampak sosial.

Dengan demikian refleksi terhadap pengalaman UEA dan Serbia memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi Islam ditentukan bukan oleh komposisi demografi, tetapi oleh visi kebijakan, tata kelola, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Indonesia yang memiliki

potensi pasar yang besar dan posisi strategis di dunia Muslim dan memiliki peluang kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah global apabila mampu menggabungkan pendekatan kelembagaan yang kokoh seperti UEA dengan fleksibilitas adaptif seperti Serbia. Perbandingan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki karakter *universal* yang dapat diterapkan pada berbagai konteks negara. Pendekatan *hibrida* inilah yang dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

## CONCLUSION

Pembahasan mengenai dinamika dan perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di Uni Emirat Arab (UEA) dan Serbia menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh latar budaya, kondisi politik, karakter regulasi, serta orientasi pembangunan masing-masing negara. UEA menjadi contoh negara yang mampu mengintegrasikan peluang global tersebut ke dalam strategi nasional, sehingga ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen penting untuk memperkuat daya saing internasional. Di sisi lain Serbia menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah dapat tetap berjalan melalui dorongan kebutuhan pasar, integrasi ekonomi regional, serta peran komunitas lokal, meskipun belum didukung sepenuhnya oleh struktur kebijakan negara.

Perbandingan kedua negara menunjukkan dua pendekatan yang saling melengkapi model UEA yang bersifat formal, terstruktur, dan nasionalistik, serta model Serbia yang tumbuh secara perlahan dan berbasis kebutuhan komunitas. Keduanya membuktikan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak serta-merta ditentukan oleh besarnya populasi Muslim, tetapi lebih pada kualitas kebijakan, kemampuan adaptasi, serta respons terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Perbedaan ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat berkembang fleksibel dalam berbagai konteks global.

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kedua contoh ini menawarkan pelajaran berharga. Dari UEA Indonesia dapat meniru penguatan tata kelola syariah, penyesuaian regulasi, pemanfaatan inovasi digital, serta integrasi sektor halal secara menyeluruh. Sementara itu, Serbia mengajarkan pentingnya membangun ekonomi syariah dari level komunitas, terutama untuk memperkuat UMKM dan masyarakat yang masih minim akses ke layanan keuangan formal. Pendekatan berbasis kebutuhan, seperti yang dilakukan Serbia, dapat menjadi solusi efektif bagi wilayah Indonesia yang infrastruktur keuangannya masih terbatas.

- Abdullah, A., Ismail, S. M., & Zainal Abidin, H. F. (2017). The Role of Shariah Law in Islamic Financial Contracts in the UK and the US: A Comparative Analysis. *ICR Journal*, 8(2), 244–255. <https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.198>
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2022). Shariah governance framework and Islamic banking performance: Evidence from GCC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 750–768. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2020-0565>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Brankov, T., & Matkovski, B. (2022). Is a food shortage coming to the Western Balkans?. *Foods*, 11(22), 3672. <https://doi.org/10.3390/foods11223672>
- Christian, N., Ong, C. M., Wisely, J. V., & Jaslyn, J. (2024). Perbandingan Analisis Negara Uni Emirat Arab dan Indonesia dari Segi Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621–119. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/797>
- Dinar Standard. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21: Thriving In Uncertainty*. Retrieved from <https://cdn.salaamgateway.com>
- Grira, J. (2021). Banks, Funds, and risks in islamic finance: Literature & future research avenues. *Finance Research Letters*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101815>
- Hanić, A. (2017). Process of internationalization in Islamic banking: the case of Serbia. *Economic Analysis*, 28, 1–9. <http://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/544>
- Hanif, M. (2025). Achievement of Islamic Finance Objectives: Evidence from the UAE Islamic Banking Industry. *Risks*, 13(5), 91. <https://doi.org/10.3390/risks13050091>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>

- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Chebab, D. (2021). Integrating Islamic finance and halal industry: current landscape and future forward. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.1504/ijimb.2021.117594>
- Holle, M. H., Asiyah, B. N., Saimima, S., & Muhrim, M. R. (2025). Maximizing the Role of Micro Waqf Banks as an Alternative Platform for Financial Inclusion in Amboina City. *Journal of International Conference Proceedings*, 7(3), 658–669. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i3.3727>
- Kacar, B., Curic, J., & Ikić, S. (2017). Islamic banks and finance and the possibility of agricultural investments in the Republic of Serbia. *Ekonomika Poljoprivrede*, 64(3), 1081–1100. <https://doi.org/10.5937/ekopolj1703081k>
- Kara, A. (2021). Stabilizing instability-suboptimality-and-chaos-prone fluctuations at crisis junctures: Stochastic possibilities for crisis management. *International Journal of Finance & Economics*, 28(2). <https://doi.org/10.1002/ijfe.2507>
- Karyati, Z. Program Studi Teknik Informatika, U. I. P. (2016). Antara EYD dan PUEBI Suatu Analisis Komparatif. *Jurnal SAP*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v1i2.1024>
- Khaeruddin, K., & Hidayat, S. (2020). Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi di Timur Tengah (2002-2018). *Chronologia*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.5891>
- Khavarinezhad, S., Biancone, P., & Jafari-Sadeghi, V. (2021). Financing in the Islamic System and Sustainable Economic Development of Selected Islamic Countries. *European Journal of Islamic Finance*, 19(2021), 18–23. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6158>
- Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2021). *Teknik Analisa. Bandung: Alfabeta.*
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Melinda, T. S. (2025). *Fintech Syariah: Inovasi, Regulasi dan Implikasi Ekonomi*. Cirebon: Ruang Aksara Media.
- Mahmuda, A., Willy, W. B., & Armia, M. S. Bin. (2025). Analisis Perkembangan Industri Fintech Syariah Di Negara United Arab Emirates Dan Egypt. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 73–84. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7410>
- Mashal, M. I. (2022). Legal Framework To Support Islamic Banking and Finance In The United Arab Emirates. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(2), 196–233. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5341>

- Meskovic, A., Kozarevic, E., & Avdukic, A. (2021). Social performance of Islamic banks: Theoretical and practical insights. *European Journal of Islamic Finance*, (21), 1–10. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6199>
- Pesendorfer, J., & Lehner, O. (2016). Islamic Banking and Finance As an Ethical Alternative: a Systematic Literature Review. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 5, 42–64. <https://ssrn.com/abstract=2898785>
- Putra, A. R. (2025). Alkohol legalization in United Arab Emirates’: Between local norms and global tolerance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(2), 163–171. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i2.22820>
- Rahmat Hidayat. (2025). Dibamika Pemikiran Ekonomi Syariah dalam Menjawab Realitas Ekonomi Modern. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.2000>
- Rammal, H., Pereira, V., Temouri, Y., Laker, B., Tarba, S., & Ferreira, J. J. (2025). The institutional development of Islamic finance in the Middle East: A post-colonial comparative perspective. *Business History*, 67(2), 395–412. <https://doi.org/10.1080/00076791.2023.2233429>
- Sallom, D. S., & Syu’aib, K. (2022). Matchmaking In Pesantren: The Role of Wali Mujbir in Matchmaking with Maqasid Sharia Perspectives. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1), 78–91. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1073>
- Samud, S., Shadiq, T. F., & Hasanah, H. (2025). Inclusion and Literacy, Strategies for the Future of Islamic Finance. *MSJ: Majority Science Journal*, 3(1), 144–153. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i1.274>
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Rahman, A. A., Othman, A. N., Kirana, K. C., Nizar, M., Sari, N. S., Lestari, K. T., & Bayuni, A. (2025). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf Kajian Teori dan Praktik di Indonesia dan Malaysia*. Malang: Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya.
- Tiran, M. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188. <https://doi.org/10.54783/ijisoc.v5i3.735>
- Turan, M. (2023). Financial Technology, Economic Politics and Islamic Finance in the Gulf Countries: The Case of the United Arab Emirates. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 104–125. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1253267>

Yagoub, M. (2019). Total Public Expenditure and Long-term Economic Growth in Algeria: Applied Theoretical and Empirical Approaches Using ECM. *Management and Economics Review*, 4(2), 83–91. <https://doi.org/10.24818/mer/2019.12-01>

Zarrouk, H., El Ghak, T., & Abu Al Haija, E. (2017). Financial development, Islamic finance and economic growth: evidence of the UAE. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 2-22. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2015-0020>